



**Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat**



**Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat**

**LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015**

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat  
Tahun 2016**

**Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat  
Tahun 2016**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Hesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah pada Dinas Hesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan serta Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah dalam menunjang pembangunan Daerah khususnya di bidang Hesehatan Dinas Hesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015

Harapan kami Laporan Kinerja Dinas Hesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 ini menjadi media dalam membangun kebersamaan, sinergitas serta komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat terbaik khususnya di jajaran Dinas Hesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada masa datang.

Akhirnya semoga Tuhan senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya serta perlindungan bagi kita semua amin ya robbal alamin.

Ayo bergerak dan bekerja keras menuju Sulawesi Barat Sehat dan Malaqbi

Mamuju, 12 Maret 2016  
Kepala Dinas Hesehatan  
Provinsi Sulawesi Barat

Dr. H. Achmad Azis, M.Hes

# DAFTAR ISI

HATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Tupoksi.....	4
C. Sumber Daya Manusia.....	5
D. Sarana Prasarana.....	12
BAB II. DOKUMEN PERENCANAAN.....	15
A. Rencana Strategis .....	15
B. Rencana Kerja Tahun 2015 .....	19
BAB III. CAPAIAN HINERJA.....	21
A. Capaian Hinerja .....	21
B. Masalah .....	29
BAB IV. PENUTUP .....	40

LAMPIRAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka

mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Barat yaitu **“Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat tahun 2016”** dan Misi Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah. Misi ini terfokus pada peningkatan kapasitas, kompetensi dan etos profesional aparaturnya dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi yang diemban SKPD.
2. Memperluas dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi. Misi ini terfokus pada pengembangan sarana ekonomi vital yang memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan agroindustri, industri pertambangan minyak, gas dan mineral serta volume perdagangan yang kesemuanya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dinikmati berbagai unsur masyarakat.
3. Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.
4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan yang utuh dan terpadu, khususnya pada penerapan kurikulum nasional berbasis sekolah, pembinaan moral, budi pekerti, karakter, bahasa, emosional, estetika serta sikap beragama dan spiritual, apresiasi seni-budaya dan pengembangan kreativitas pemuda dan olahraga serta kesetaraan gender.
5. Penerapan Kebijakan yang Berpihak pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi ini terkait dengan upaya

pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dan kebijakan yang menjamin daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan

Berdasarkan pada visi dan misi diatas maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung sepenuhnya pencapaian visi Pemerintah Sulawesi Barat tahun 2011-2016 serta mendukung pelaksanaan misi tersebut diatas.

Berdasarkan Tupoksi SKPD maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung pelaksanaan misi Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.

Sebagai laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015, disusun Laporan pelaksanaan Pembangunan Daerah (LPPD) Bidang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007.

Pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat Sulawesi Barat, yaitu untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara aman, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah, baik di daerah terpencil, pedalaman, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Barat mengakui bahwa kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Terbatasnya pelayanan kesehatan di Sulawesi Barat merupakan upaya tantangan bagi pemerintah untuk menempuh langkah-langkah khusus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara mudah dan merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat memiliki Visi **“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan mandiri pada tahun 2016”** yang diwujudkan dalam 4 (Empat) misi :

- a. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
- b. Mengupayakan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
- c. Menjamin Ketersediaan obat esensial sesuai standar
- d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

## B. TUPOKSI

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh :

1. Sekretaris
2. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
3. Bidang Pelayanan Medis
4. Bidang Bina P2PL
5. Bidang Pelayanan Farmasi

Sekretaris dan Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Dinas Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dan hubungan koordinasi dengan bidang lain yang bertanggung terhadap ketersediaan obat. UPT tersebut yaitu Intalasi Farmas dan UPTD Poliklinik Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat

Dalam Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Penyelenggaraan bidang urusan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan,



bina penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit serta sumber daya kesehatan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit serta sumber daya kesehatan
4. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD

#### C. Sumber Daya Manusia

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui perbaikan fisik dan penambahan sarana prasarana, penambahan peralatan dan ketenagaan serta pemberian biaya operasional dan pemeliharaan. Namun dengan semakin tingginya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan semakin meningkat. Untuk itu dibutuhkan penambahan tenaga kesehatan yang terampil dan siap pakai sesuai dengan karakteristik dan fungsi tenaganya.

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di Masyarakat

Dinas Kesehatan pada tahun 2015 memiliki 129 pegawai dengan rincian terlampir ;

NO	NAMA / TEMPAT / TGL. LAHIR /	NIP	GOL RUANG	JABATAN
1	2	3	4	6
1	dr.H.Achmad Azis,M.Kes / Sengkang / 15 Mei 1959	19590515198903106	IV/d	Kadinkes Prov.Sulbar
2	Dra.Hj.Rustia,sy, Apt., M.Kes, RS/Polmas /13 Agustus 1959 /	195908131988032001	IV/b	Kepala UPTD Gudang Farmasi
3	Dra.Hj.Sufiani,Apt,M.Kes/Sinjai,1963	196312311995032005	IV/b	Kepala Bidang Bina Kefarmasian dan Jaminan Kesehatan

4	dr.Hj.Indahwati Nursyamsi, MARS / Ujung Pandang / 06 Maret 1968	196803062002122002	IV/a	Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dasar
5	dr.H.Muh.Ihwan/01 Mei 1972	197205012000121006	IV/a	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
6	Muzdalipah,SKM,M.Kes / Lise / 07 April 1970	197004071998031007	IV/a	Sekretaris Dinas Kesehatan
7	dr.Hj.Nursyamsi R.Hamsah/Ujung Pandang/01 Peb 1970	197002012002122006	IV/a	Kabid Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak
8	Hj.Rosmiani, SE, M.Kes / 12/04/1967	196704121987032000	IV/a	Kepala UPTD Poliklinik Kesehatan
9	Syarifuddin Hamal,SKM / Tinambung / 17 September 1959	195909171985031027	III/d	Kasie Kesehatan Lingkungan
10	Jayasni,Ssi,Apt / Mambi / 22 Desember 1972	19721222200312 2 010	III/d	Kasubag Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi
11	Aminuddin,SSi,Apt / 19 November 1970	197011192003121002	III/d	Kasie Distribusi dan Penyimpanan UPTD Instalasi Farmasi
12	dr.Hj.Marintani Erna/ 24 Mei 1969	196905242003122000	III/d	Kasie Pengendalian Penyakit
13	dr.H.Awaluddin/ 01 Mei 1964	196405012002121005	III/d	Staf Poliklinik
14	Hj.Lidyawati Dahlan,SKM / Tinambung / 02 Maret 1978	197803022001122000	III/d	Staf Dinkes
15	dr.Asra Nur/Wasewali Soppeng/ 29 Mei 1975	197505292002122000	III/d	Staf Dinkes
16	Wahyuddin,SE,M.Kes / Congko / 14 Februari 1973	19730214 2006041013	III/d	Kasubag Program dan Pelaporan
17	Sriyana Makkasau,SKM,M.Kes/ Pare-pare / 09 Desember 1975/KR.IV-0354/KARPEG/I-P3/2008	197512092006042017	III/d	Kasie Sarana dan Peralatan ALKES
18	Sofiawaty Sofyan,SP,M.Kes/Pinrang/25 Juli 1974/KR.IV-0354/KARPEG/I-P3/2008	197407252006042028	III/d	Kasie Gizi
19	Firman Gazali,SKM,M.Kes / Ujung Pandang / 26 Desember 1977	197712262006041013	III/d	Kasie Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
20	Andi Tenri Bulaeng,STP,M.Kes/Amparita Sidrap/14 April 1975/KR-.IV-0354/KARPEG/I-P3/2008	197504142006042033	III/d	Kasie Kesehatan Ibu dan Anak
21	Sri Surianti,SKM,M.Kes / Gandra / 15 Agustus 1977	197708152006042029	III/d	Kasie Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra
22	Ernawati Sessu, SKM / 01 Juni 1974	197406011999032000	III/d	Staf Sekretariat

23	dr.Dewi Kartikaningsih / Surabaya / 29 Mei 1977	197705292006042000	III/c	Staf Dinkes
24	dr.Darmawiah/01 September 1980/	198009012006042023	III/c	Kasie Pelayanan Kesehatan Dasar
25	A.Erieka Novianti,SKM,M.Kes/Ujung Pandang 1 November 1980	198011012003122007	III/c	Kasie Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Khusus dan Pengembangan
26	Mahdiana.B,SKM / Mamuju / 28 Juli 1980 / KR-N-1167/KARPEG/C-58/04	198007282003212008	III/d	Kasubag Keuangan dan Perlengkapan
27	Muh.Tamsil / Majene / 01 Februari 1970	197002011991011001	III/c	Kasie Kefarmasian Makanan dan Minuman
28	A.Taswin Akbar R,S.Farm/Galung Mamuju/22 Juni 1983	198306222006041006	III/c	Kasie Perencanaan dan Pelaporan UPTD Instalasi Farmasi
29	Hartati, S.Kep,Ns/ 31 Oktober 1975	197510311999032001	III/c	Staf Poliklinik
30	Sukma Jaya, SKM/ Mamuju 19 Juli 1978	197807192006041010	III/c	Staf Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
31	Wahida, SKM / Majene, 29/12/1980	198012292005022007	III/c	Staf Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
32	Nuraeni Amir,SKM/Pinrang/30 Oktober 1982	198210302008042002	III/b	Kasie Kestrad, Alternatif, komplementer dan kesehatan kerja
33	Nana Darmania,S.Sos,M.Kes / Surabaya / 25 Desember 1974 /	197412252007012025	III/d	Kasie Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
34	Jailuddin T, S.Pd.I / Polmas, 31/12/1960	196012311986031500	III/c	Kasubag Umum dan Kepegawaian
35	dr.Reni Tengar/Parepare/07/06/1978	197806072006042024	III/b	Staf Dinas Kesehatan
36	dr. Andi Dhedie Prasetya Sam,S.Ked/ 17 Agustus 1984 /	19840817200902 1 001	III/c	Staf Binkesmas
37	Wahidah,SKM / Wonomulyo/25 Desember 1979	197912252008042003	III/b	Staf Dinkes
38	Yuliana, SKM / Pasabbu/10-9/1978/	197809102008042000	III/b	Staf Umum dan Kepegawaian
39	Nirwana, SKM /Mamuju/15 November 1972	197211152001122003	III/b	Staf Kesehatan Lingkungan
40	Syukriani/Baturoro/25 Agustus 1980/KR.IV-0341/KARPEG/I-P3/2008	198008252006042032	III/b	Staf Surveilans, Imunisasi dan kesehatan Matra
41	Andi Karyawati,SKM,M.Kes / Leppang / 04 Mei 1982 /	198205042009022003	III/b	Staf Umum dan Kepegawaian
42	Iriyanti,SKM / UjungPandang /11 September 1983 /	19830911200902 2 003	III/b	Staf Program dan Pelaporan

43	Faradilla Sandi Mansyur,SKM / Mamuju / 01 Maret 1985 /	19850301200902 2 004	III/b	Staf Binkesmas
44	Anwar,SKM / Sumpang Ale /03 April 1980 /	19800403200902 1 003	III/b	Staf P2PL
45	Hasriani Anwar,S.Kep / Salujambu / 09 September 1985 /	19850909200902 2 009	III/b	Staf Program dan Pelaporan
46	Fadliati,SKM / Majene / 03 Agustus 1986 /	19860803200902 2 002	III/b	Staf P2PL
47	Yustinus,SKM / Mamuju /10 Januari 1980 /	19800110200902 1 002	III/b	Staf Poltekkes
48	Mufridah M.Nadir,S.Farm / Mamuju /23 Mei 1984 /	19840523200902 2 004	III/b	Staf Yanfar
49	Maya Sofyan,SKM / Benteng / 13 Mei 1982 /	19820513200902 2 002	III/b	Staf Binkesmas
50	A.Chandrawali,SKM,M.Kes / Tanete / 31 Januari 1978 /	19780131200902 2 001	III/b	Staf Poltekkes
51	Nurlaela,S.SIT / Bulukumba / 15 Mei 1982 /	19820515200902 2 004	III/b	Staf Binkesmas
52	Muskiah. B/ Majene 2 Desember 1978	197812022002122003	III/b	Staf Dinkes
53	Emilda Yulinda, SKM/ 24 Juli 1973	197307241992032001	III/b	Staf Dinkes
54	Armawati,SKM / 12 November 1981 /	19811123200902 2 004	III/b	Staf Binkesmas
55	Fauziah Ahmad,S.SIT / Ujung / 22 Oktober 1985 /	19851022200902 2 006	III/b	Staf Binkesmas
56	Dewi Karlina Abeng,SKM/Ujung Pandang/05 Maret 1984/	198403052010012021	III/b	Staf Binkesmas
57	Myardi Mulawardi/Ujung Pandang/25 Maret 1986 /	198603252010011007	III/b	Staf P2PL
58	Nur Aminuddin Ramlie,SKM	580031477	III/a	Staf Program dan Pelaporan
59	Rina Latif,A.MG/Ujung Pandang/1 Maret 1971	197103011995032002	III/a	Staf Binkesmas
60	Suryalinda,AMK / Rante Palado /07 September 1986 /	19860907200902 2 005	III/a	Staf Pelayanan Medik
61	Aini Aisyah Alfian Putri/ Ujung Pandang, 27/02/1981	198102272005022004	III/b	Staf Umum dan Kepegawaian
62	Sri Wahyuni,SKM/Majene/28 Desember 1986	198612282010012015	III/b	Staf Keuangan

63	Rahmawati,SKM/Salu Kalobe/10 Februari 1980/	198002102010012011	III/b	Staf Binkesmas
64	Arsiwanty AR,SKM/Sinjai/03 Februari 1983/	198302032010012016	III/b	Staf Program dan Pelaporan
65	Fajriana,S.Farm/Oro Batu/23 September 1983	198309232010012016	III / b	Staf UPTD Gudang Farmasi
66	Muh.Irfan Ilham Atjo,SKM/Somba/30 Juni 1986	198606302010011005	III/b	Staf Keuangan
67	Yogi Prayogi / Kuningan / 23 Maret 1975	580031504	III/a	Staf Dinkes
68	Rachmi,SKM / Maros / 01 Agustus 1970	197008011993112001	III/b	Staf Subag Program dan Pelaporan
69	Darwis, SKM/ 05 Maret 1984	198403052005011005	III/b	Staf Binkesmas
70	Agustina Uta Tabang Kalua, S.Gz/29 November 1979	197911292005012020	III/a	Staf Binkesmas
71	Yulianus Dupa Budi,A.Md.F / Soroako / 25 Juli 1978	19780725200604 1 017	III/a	Staf.Obat dan Alkes
72	Irwan Adi Putra, SKM/ 11 Januari 1982	198201112006041017	III/a	Staf P2KL
73	Faisal,ST / BontoBangun / 28 Agustus 1977 / KR.IV-0354/KARPEG	197708282006041023	III/a	Staf Pelayanan Medik
74	Heriyanto Karim,SKM / Majene, 16/04/1986	198604162011011000	III/b	Staf Keuangan
75	Mardawiah,SKM / Latedong, 17/05/1984	197712252011011000	III/b	Staf Yanfar
76	Jawahira,SKM / Punranga, 25/12/1977	197712252011011000	III/b	Staf Binkesmas
77	Zaldy Al Qadri,SKM / Ujung pandang, 22/05/1987	198705222011011000	III/b	Staf Umum dan Kepegawaian
78	drg.Rasdiana / Majene, 07/08/1989	198908072015062000	III/b	Staf Dinkes
79	Musdalifah,SKM / Mambi, 06/09/1986	198609062011012000	III/b	Staf P2KL
80	Niswah Nurdin,SKM / Ujung Pandang, 05/06/1984	198709282011012000	III/b	Staf UPTD Gudang Farmasi
81	Armianti,SKM / Ujung Pandang, 28/09/1987	198709282011012000	III/b	Staf Keuangan
82	Marjono,SKM / Mamasa, 21/03/1985	198503212011011009	III/b	Staf Program dan Pelaporan

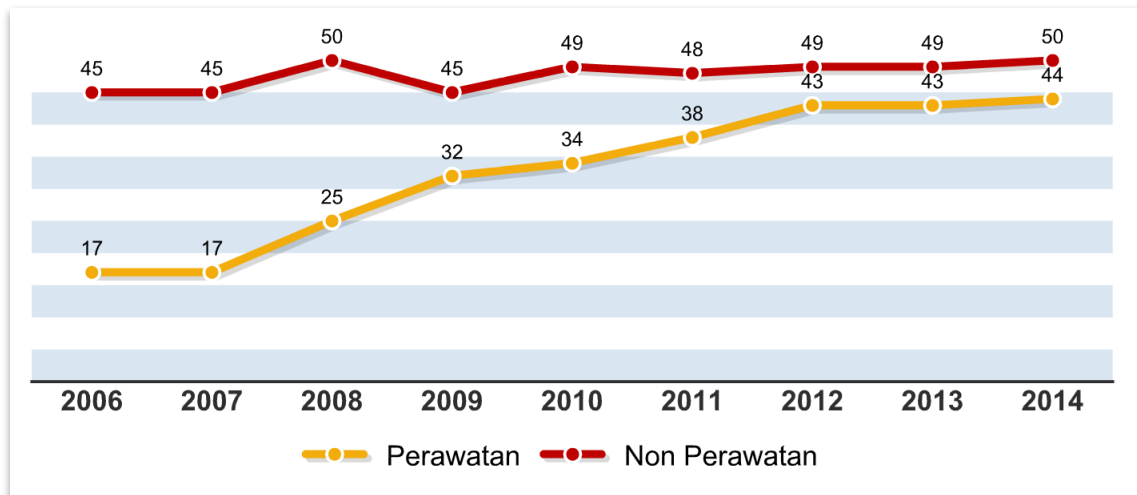
83	Nurdiani,SKM / Polewali,20 Maret 1987	198703202011012000	III/b	Staf Program dan Pelaporan
84	Syafruddin, S.Farm / Majene, 14/09/1988	198809142011011000	III/b	Sraf Kefarmasian, Makanan dan Minuman
85	Rina,S.Farm / Ugi Baru, 21/071985	198507212011012000	III/a	Staf UPTD Gudang Farmasi
86	Fita Diansari, S.Si.Apt / Ujung pandang, 21/03/1986	19860321 201101 2 016	III/c	Staf Yanfar
87	Rendi Rivaldi,SKM / Mamuju, 11/12/1986	198612112011011000	III/a	Staf Yanfar
88	Faridah Wahab,S.Farm / 17 Oktober 1986	198610172011012000	III/a	Staf UPTD Gudang Farmasi
89	Muh.Jafar,AMK / Pallu'dai /05 Juni 1984 /	19840605200902 1 004	III/a	Staf Pelayanan Medik
90	Endrawaty Amrah/Ujung Pandang/22 desember 1978	19781222 200604 2 027	III/a	Staf Umum dan Kepegawaian
91	Iqbal / TombloPai / 03 April 1980	198004032006041020	III/a	Staf Pelayanan Medik
92	Irham A.md,KI / Polewali / 13 Januari 1975	197501132006041007	III/a	Staf Program dan Pelaporan
93	Ririn Handayani,Amd.Kep/Pekkae/21-07/1984/KR.IV-0354/KARPEG/I-P3/2008	198407212006042000	III/a	Staf P2PL
94	Haryanti,Amd.Pk/Pinrang/06-09-1983/KR.IV-0354/KARPEG/I-P3/2008	198309062006042020	III/a	Staf UPTD Poliklinik
95	Rini Ekaputri,Amd.Tem / Bantaeng / 03 Juni 1979 / KR.IV-0354/KARPEG/I-P3/2008	197906032006042030	III/a	Staf.Obat dan Perbekkes
96	Ika Yulianti,A.Md.KI / Banyuwangi / 27 Juli 1985	198507272008042005	II/d	Staf P2PL
97	Ahmad,Amd.Kep / Kalukku /05 November 1986 /	19861105200902 1 002	II/d	Staf Binkesmas
98	Pardi,Amd.Kep / Pempionang /31 Desember 1985 /	19851231200902 1 005	III/a	Staf Pelayanan Medik
99	Yulianti,Amd.Kep / Ujung Pandang /24 Agustus 1987 /	19870824200902 2 002	II/d	Staf Pelayanan Medik
100	Abdullah.S,Amd.KL / Batetangnga /12 Februari 1982 /	19820212200902 1 004	II/d	Staf P2PL
101	H. Amirullah, S.Kep / Belang-belang /12 Februari 1982 /	19820212200902 1 004	III/a	Staf Umum dan Kepegawaian

102	Ramadhan,AMK / Tinggas-tinggas /01 Juli 1985 /	19850701200902 1 002	II/d	Staf P2PL
103	Sriwati Najamuddin,Amd / Somba / 03 Januari 1980 /	19800103200902 2 005	II/d	Staf P2PL
104	Suleha J,Amd.Kep / Bonra / 17 September 1982 /	19820917200902 2 005	II/d	Staf Umum dan Kepegawaian
105	Febry Sutrianty,Amd.Farm / Tajuncu / 06 Februari 1984 /	19840206200902 2 003	II/d	Staf Poliklinik
106	Satriani,Amd.Farm / Pinrang /08 Maret 1986 /	19860308200902 2 005	III/a	Staf Gudang Farmasi
107	Afdaliah,AMK / Sampaga /02 Februari 1985 /	19850202200902 2 008	II/d	Staf Binkesmas
108	Idawati,AMG/Sirindu/10 November 1979 /	197911102003122001	II/d	Staf Binakesmas
109	Muhammad Rizal, A.Md.Ft / Punranga, 04/12/1975	1975120152011010000	III/a	Staf Pelayanan Medik
110	Sri Handayani, AMD.Kom / Ujung Pandang, 26/09/1985	19850926 201101 2 022	II /d	Staf Penyusunan Program dan Pelaporan
111	Nur Asryany Pratama, Amd.Far / Ujung Pandang, 23/12/1988	'19881223 201101 2 019	II /c	Staf Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
112	Rika Karmeli Rerung,AMK / Parepare, 07/01/1984	198401072011012000	II /d	Staf Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra
113	Muh.Saleh,AMK / Tandassura, 07/04/1987	198704072011011000	II /c	Staf Perencanaan
114	Syamsucri, A.Md.KL / Kutulu, 06/08/1975	19750806 201001 1 018	II /c	Seksi Kesehatan Lingkungan
115	Rida Hasriani, AMKG / Soppeng, 12/04/1987	198704122015032001	II/c	Staf UPTD Poliklinik
116	Adryani Sirandan, Amd.Farm/ 28 Agustus 1989	198908282010012001	II/d	Staf UPTD Gudang Farmasi
117	Nurul Iman,Amd.Kep/Lapeo/30 November 1987/	198711302010012012	II/d	Staf Pelayanan Medik
118	Idrus Hasni Muhammad Yasin,Amd.Farm/Lombok Tengah/24 April 1981/	198104242010011009	II/d	Staf UPTD Gudang Farmasi
119	Evi Kalsum, AMK / Ammani, 20/05/1988	198805202011012014	II/d	Staf Umum dan Kepegawaian
120	Megawati S, Amd.Kep / Polewali, 16/07/1985	198507162011012016	II/c	Staf Kestrad, Alternatif, Komplementer dan Kesker
121	Muslimin / Pangkajene / 17 Juni 1981	198106172006041013	II/c	Staf P2KL

122	Dian Sartika Rahman/Pare-pare/25-07-85/KR.IV-0220/KARPEG/I-P3/2008	19820606 2010011025	II /b	Staf Pelayanan Medik
123	Mansyur	19820606201001 1025	II /a	Staf Poliklinik
124	Harsalim / Lampa, 18/08/1978	19780818 201001 1 020	II /c	Staf P2KL
125	Fatimah Azis / Nunukan, 04/05/1984	198405042014082002	II/a	Staf Penyehatan Lingkungan
126	Edyawati / Pabeta, 24/04/1982	198204242014102001	II / a	Staf Umum dan Kepegawaian
127	Kasfanuddin / Pompanua, 03/11/1984	198411032014101001	II/a	Staf Pengendalian Penyakit
128	Staf Pengendalian Penyakit	198304142015041001	II /a	Seksi Sarana Prasarana dan Alkes
129	Rasdiana	198604142014102002	I/a	Staf Keuangan dan Perlengkapan

#### D. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Data tahun 2015 Jumlah Rumah sakit di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 9 Rumah sakit yang terdiri atas 7 Rumah Sakit Pemerintah dan 2 Rumah Sakit Swasta. Jumlah Puskesmas tahun 2015 sebanyak 95 Puskesmas yang terdiri atas Puskemas Non Perawatan 54 dan Puskesmas Perawatan 44 Puskesmas.





Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat asset yang dikuasai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 sebesar Rp. 6.664.192.267 dan asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 292.552.455

## **BAB II**

# **DOKUMEN PERENCANAAN**

**BAB II****DOKUMEN PERENCANAAN****A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Dinas Kesehatan tahun 2012 – 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012 – 2016.

Renstra Dinas Kesehatan merupakan acuan dalam perencanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun. Renstra Dinas Kesehatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.1

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Kinerja Program	2015
Menurunkan Angka kematian Ibu dari 185/100.000 kelahiran menjadi 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka Kematian Ibu menurun hingga 50% pada tahun 2016	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	67
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (Cakupan K4)	74,09
Terselenggaranya Standarisasi dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Meningkatnya standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase RS yang terakreditasi	60

dan Rujukan				
			Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS	75
			Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	48
Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 13,2 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 10/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka kematian Bayi menurun hingga 20% pada tahun 2016	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	85
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	90
Menurunkan Angka Kematian Balita dari 14,2 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 10,3/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka kematian Balita menurun hingga 27% pada tahun 2016	Menurunnya Angka Kematian Balita	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	83,76
Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016	Prevalensi gizi buruk menurun hingga 25% pada tahun 2016	Prevalensi Gizi buruk menurun	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	83,76
			Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Perilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat Rumah Tangga	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meningkat menjadi 80 pada tahun 2016	Persentase RT ber -PHBS	75

		70% Persentase Desa Siaga Aktif pada tahun 2016	Persentase Desa Siaga Aktif	68
		35% Sekolah Dasar mempromosikan Kesehatan pada tahun 2016	Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan Kesehatan	30
Mencegah,menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.	Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk sebesar 1 pada tahun 2016	Angka penemuan kasus malaria berkurang	Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk	1,5
	Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan	Kasus TB Paru (BTA +) ditemukan berkurang	Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan	75
	Persentase desa yang mencapai UCI	Persentase Desa UCI mencapai 100 persen pada tahun 2016	Persentase desa UCI meningkat	100
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas mencapai 82% pada tahun 2016	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas meningkat tiap tahunnya	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	75
	Persentase Kabupaten melaksanakan Pembinaan Kesehatan Kerja dan pengobatan alternatif mencapai 100% pada tahun 2016	Persentase kabupaten melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan obat tradisional	Persentase kabupaten melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan obat tradisional	100

Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%	Tersedianya obat dan vaksin disarana kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin	100
Meningkatnya kualitas manajemen dan perencanaan bidang kesehatan	100% dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	Perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	Dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	100
	100% Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Kabupaten yang melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah	Persentase Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin	83
	100% Provinsi dan Kabupaten menyusun PHA dan DHA setiap tahun	Provinsi dan Kabupaten menyusun PHA dan DHA	Persentase provinsi dan kabupaten menyusun PHA dan DHA setiap tahunnya	67
Meningkatnya kualitas Sumber daya kesehatan	100 % tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berizin	Tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berizin	Teregistrasinya tenaga kesehatan	65
Tersusunnya data dan Informasi Kesehatan yang akurat, akuntabel, lengkap dan tepat waktu	100% Kabupaten dan provinsi menyusun Profil Kesehatan dan memiliki Sistem Informasi Kesehatan	Kabupaten dan Provinsi menyusun Profil kesehatan tiap tahun dan memiliki bank data kesehatan	100 % Kab memiliki profil kesehatan menurut Jenis Kelamin	100

Sumber : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2012 – 2016

**B. RENCANA KERJA TAHUN 2015**

Program prioritas Kementerian Kesehatan terdiri atas 12 Program utama dan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan pada tahun 2015 sebanyak 9 Program prioritas atau sekitar 75%

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	RKA 2015
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	V	V
2	Program Lingkungan Sehat	V	V
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	V	V
4	Program Upaya Kesehatan Perorangan	-	-
5	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	V	V
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	V	V
7	Program Sumber Daya Kesehatan	V	V
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	V	V
9	Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat	V	-
10	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	V	V
11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	V	V
12	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	V	-
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>9</b>

Program prioritas ini dilaksanakan melalui Pelaksanaan Kegiatan; Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, Monitoring dan evaluasi, Kegiatan fasilitasi kepada kabupaten

Program kesehatan lainnya yang dilaksanakan adalah :

1. Program standarisasi pelayanan kesehatan
2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
3. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
4. Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

## **BAB III**

# **CAPAIAN KINERJA**



### BAB III

#### CAPAIAN KINERJA

##### A. CAPAIAN KINERJA

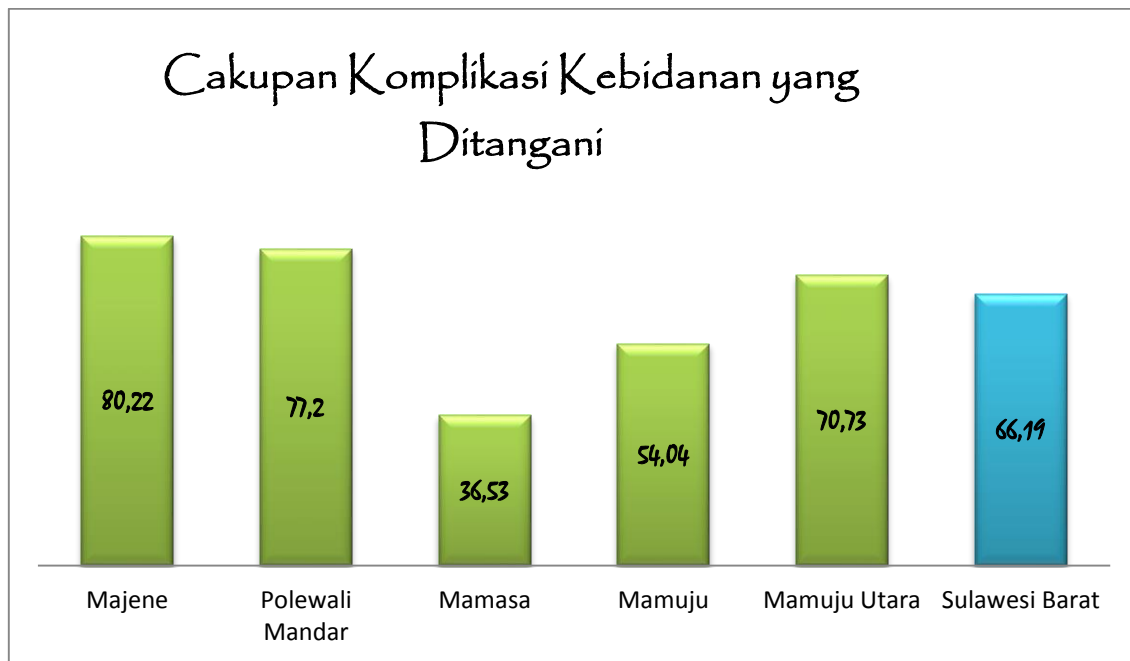
Aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib Dinas Kesehatan yang meliputi 8 (delapan) indikator kinerja kunci, yakni :

1. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani.

Risiko tinggi pada ibu hamil adalah keadaan penyimpangan dari normal yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Risti/komplikasi kebidanan meliputi Hb<8 %, Tekanan darah tinggi (Sistole >140 mmHg, diastole > 90 mmHg), Oedema nyata, eklampsia, perdarahan pervaginam, ketuban pecah dini, letak lintang pada usia kehamilan > 36 minggu, letak sungsang pada primigravida, infeksi berat/sepsis, persalinan prematur.

Dalam memberikan pelayanan khususnya oleh tenaga bidan didesa dan puskesmas, beberapa ibu hamil yang memiliki resiko tinggi (risti) memerlukan pelayanan kesehatan karena terbatasnya kemampuan dalam memberikan pelayanan, maka kasus tersebut perlu dilakukan rujukan ke unit pelayanan kesehatan yang memadai.

Rata – Rata Persentase resiko komplikasi kebidanan tahun 2015 yang ditangani sebesar 66,19% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebesar 62,33%. Kabupaten dengan capaian tertinggi Kabupaten Majene 80,22% dan capaian terkecil kabupaten Mamasa 36,53%.



Kegiatan – Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015 dalam rangka meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah sebagai berikut :

- Workshop Peningkatan Kesehatan Reproduksi dengan jumlah anggaran 193.190.000 dengan realisasi anggaran 183.340.000
- Advokasi Pelaksanaan P4K, kemitraan Bidan dan Dukun dan RTK dengan jumlah anggaran 85.095.000 dengan realisasi anggaran 60.760.000
- Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Manajemen Asfiksia dan BBLR dengan jumlah anggaran 203.230.000 dan realisasi 155.828.200

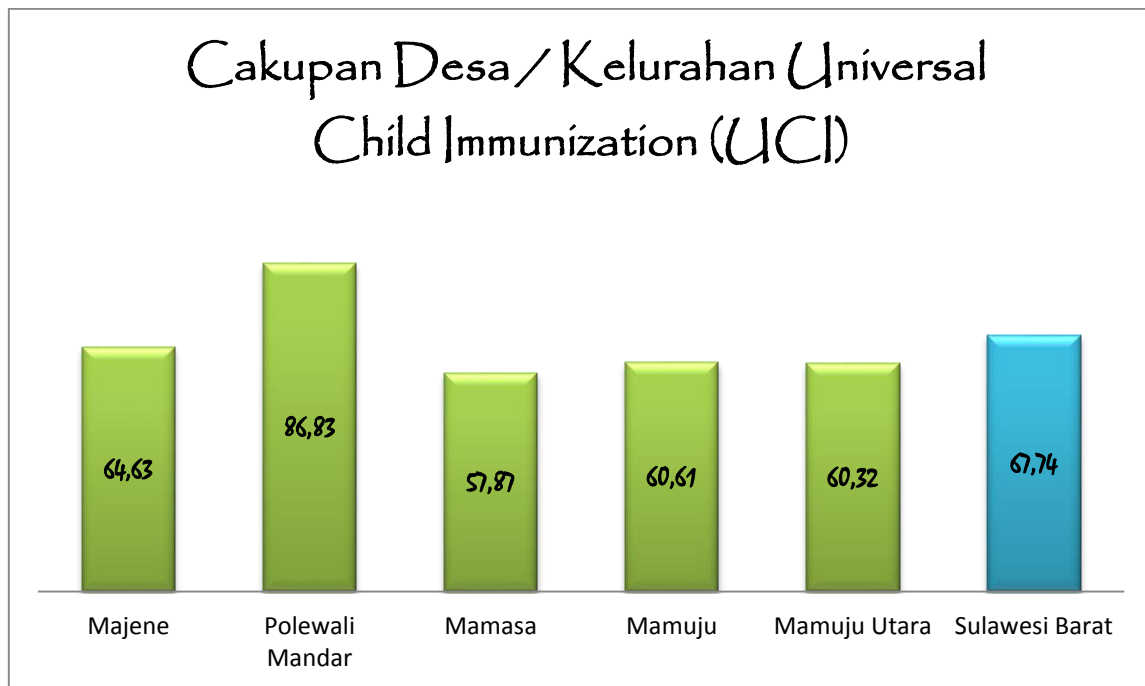
2. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan.

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2015 untuk Provinsi Sulawesi Barat sebesar 79,87%. Kabupaten Polewali adalah kabupaten dengan capaian tertinggi 83,61% dan yang terendah adalah kabupaten Mamasa 72,6%.



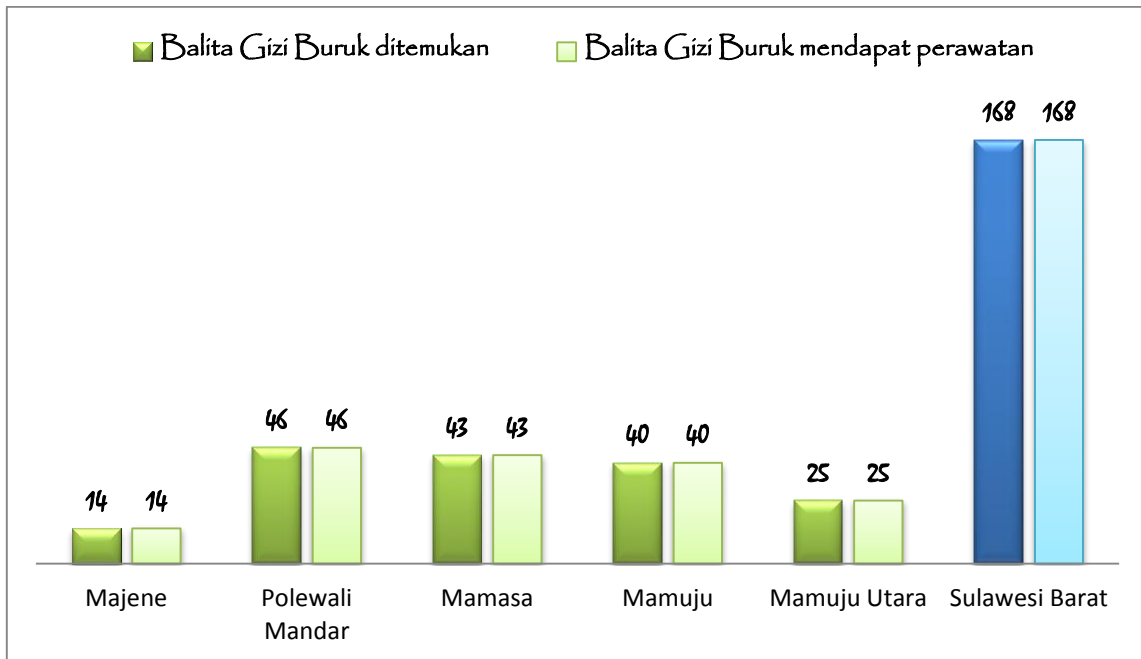
3. Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah status imunisasi anak yang lengkap. Cakupan desa / kelurahan UCI tahun 2015 sebesar 67,74%. Capaian UCI tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar 86,83% dan terendah Kabupaten Mamasa 57,87%.



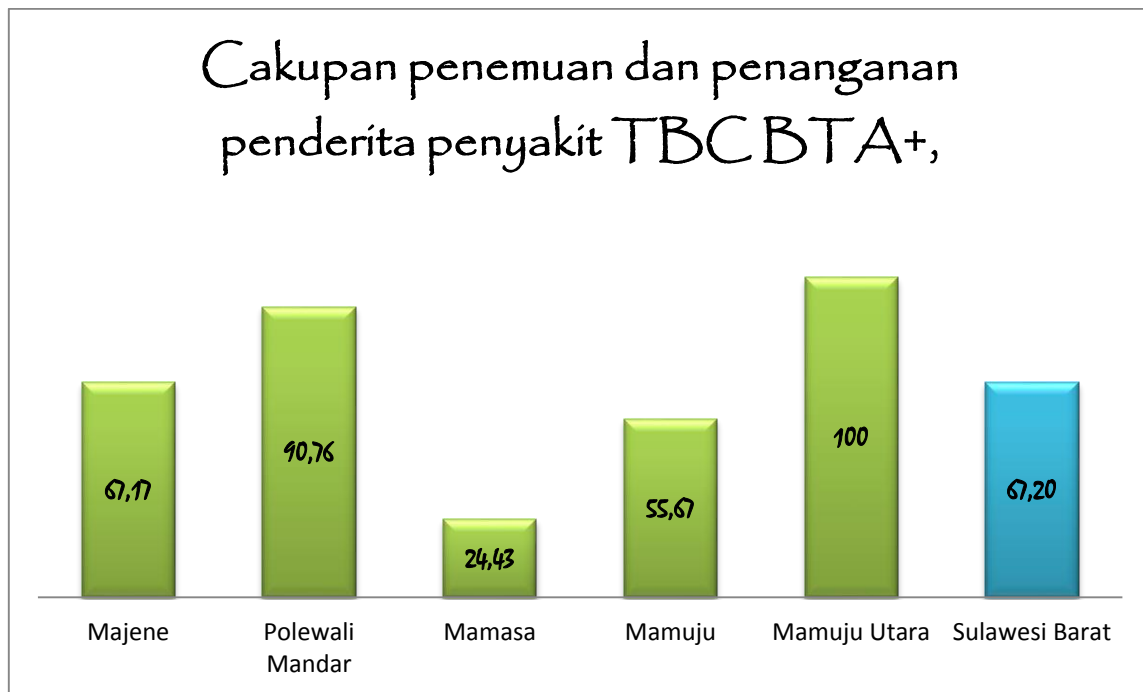
#### 4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Daerah (RISKESDAS) tahun 2013 dengan menggunakan indikator BB/U, secara umum prevalensi gizi buruk dan kurang di Sulawesi Barat adalah 29,1%. Seluruh kabupaten di Sulawesi Barat masih memiliki prevalensi gizi buruk di atas prevalensi nasional. Mengingat masalah gizi buruk disebabkan oleh multifaktor maka penanggulangannya harus melibatkan seluruh sektor terkait. Khusus sektor kesehatan penanggulangan gizi buruk dengan beberapa kegiatan seperti pemberian MP-ASI, pelacakan dan investigasi kasus gizi buruk serta perawatan kasus gizi buruk. Dari laporan kabupaten tahun 2015 jumlah kasus gizi buruk yang dirawat dan dilaporkan adalah 168 anak. Untuk mengetahui prevalensi gizi buruk setiap tahunnya harus dilaksanakan Pemantauan Status Gizi (PSG) di setiap kabupaten. Cakupan penanganan gizi buruk pada tahun 2015 sebesar 100%.



- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+

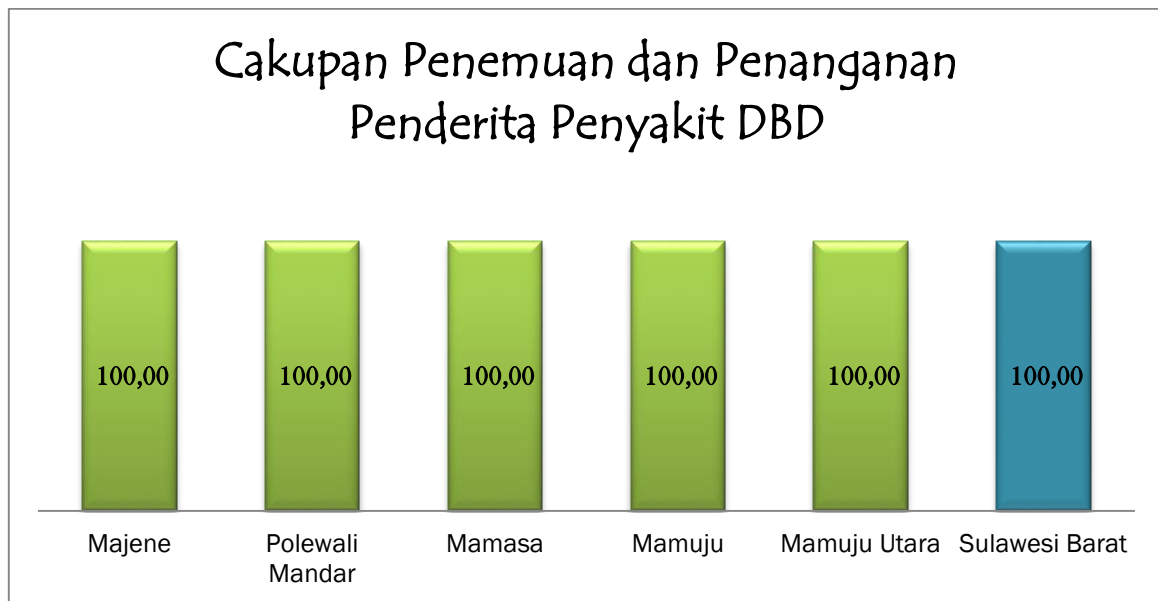
Penanggulangan TB di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun lalu. Rata – Rata Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ kabupaten tahun 2014 sebesar 45,55% menjadi 67,20% pada tahun 2015. Angka ini belum mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 70%. Kabupaten dengan cakupan penemuan dan penanganan TB tertinggi adalah kabupaten Mamuju Utara dengan capaian 100% dan yang terendah adalah kabupaten Mamasa yang hanya mencapai angka 24,43%. Kegiatan penanggulangan perlu dimaksimalkan memberdayakan semua potensi yang ada termasuk adanya sharing dana dari APBD yang masih kurang. Kegiatan penanganan penyakit TB di support lebih banyak melalui bantuan dana Global Fund (GF).



Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan peningkatan penemuan dan penanganan TB BTA+ diantaranya adalah Pelatihan Teknis dan Manajemen Pos TB Desa dengan anggaran 91.260.000 dan Pencetakan Format Pencatatan dan Pelaporan TB dengan anggaran 42.040.000

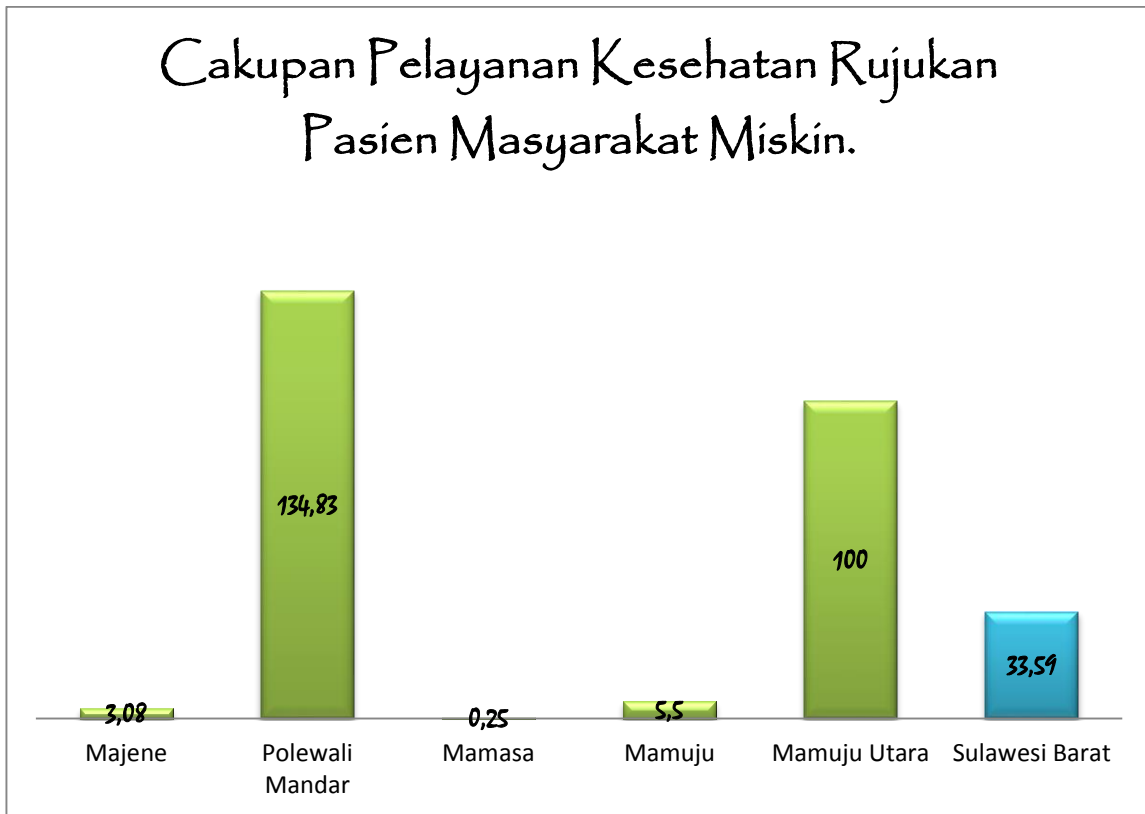
6. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD untuk Tahun 2015 sebesar 100%. Tahun ini semua Kabupaten dengan cakupan penderita DBD mampu menangani penderita penyakit DBD. Semua kasus yang dilaporkan ke sarana kesehatan ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten di kabupaten masing – masing.



7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin.

Rata – Rata Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin menurut kabupaten mengalami peningkatan Tahun 2015 sebesar 48,73% dari tahun 2014 sebesar 13,49%. Artinya dari semua masyarakat miskin yang sakit dan dirujuk ke Rumah Sakit sebesar 33,59%. Kabupaten dengan Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan yang tertinggi adalah kabupaten Polewali Mandar dengan capaian 134,83%, Capaian melebihi 100% disebabkan karena realisasi melebihi dari target yang ditentukan oleh kabupaten Polewali Mandar. Capaian terendah adalah kabupaten Mamasa dengan capaian hanya 0,25%

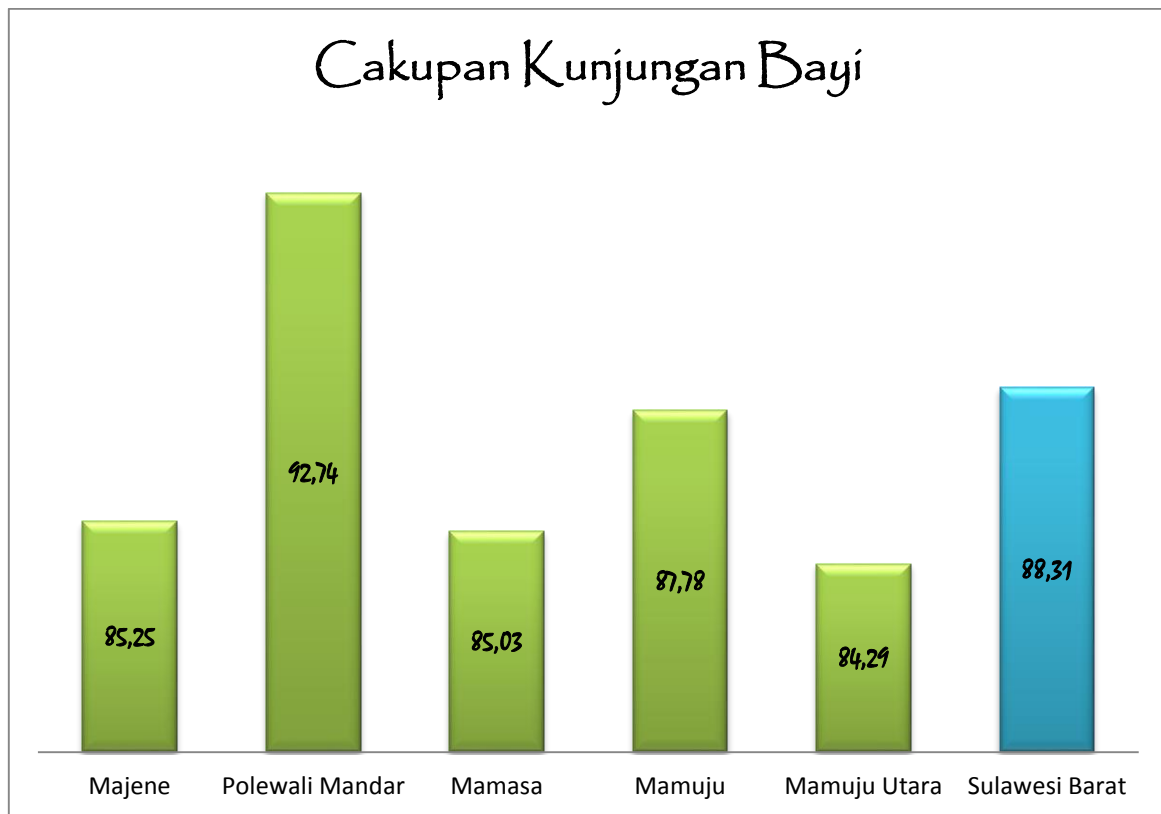


Untuk capaian sementara dalam tahap revisi di Kementerian Kesehatan RI karena indikator sarannya terlalu tinggi dan bertolak belakang dengan jumlah kasus / kejadian dilapangan

8. Cakupan Kunjungan Bayi.

Cakupan kunjungan bayi untuk tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 88,31% dari tahun 2014 sebesar 90,92%. Kabupaten dengan capaian kunjungan bayi terbesar adalah kabupaten Polewali Mandar dengan capaian 92,74% dan terendah kabupaten Mamuju Utara 84,29% Upaya penurunan kematian Bayi dapat diintensifkan dengan peningkatan cakupan kunjungan bayi ke sarana kesehatan. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan ke sarana kesehatan dan kepada petugas pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi dibidangnya





## II. PERMASALAHAN

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan.
2. Kurangnya Tenaga Kesehatan yang mau bertugas/ditempatkan di daerah-daerah terpencil.
3. Masih kurangnya tenaga dokter spesialis di Rumah Sakit
4. Belum maksimalnya penanggulangan TB dengan memberdayakan semua potensi yang ada termasuk sharing dana dari APBD yang masih kurang.
5. Masih minimnya anggaran untuk penanggulangan kasus gizi buruk di kabupaten khususnya untuk pelacakan kasus gizi buruk dan penanggulangannya.
6. Masih perlunya peningkatan kapasitas tenaga gizi khususnya di Puskesmas untuk penanggulangan gizi buruk.
7. Kualitas Pelayanan Kesehatan yang belum optimal.

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal yang telah dicapai maka diperlukan kerja keras Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Dari 8 (Delapan) indikator kinerja kunci bidang kesehatan masih ada beberapa rata – rata capaian indikator kabupaten yang masih rendah.

Pembiayaan kesehatan dengan sumber pembiayaan dari APBD Tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2015 berjumlah Rp 24.373.754.644,50 dengan realisasi 73,37% atau sebesar Rp 17.883.326.877

Saran:

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun mendatang disarankan untuk melakukan koordinasi dan advokasi kepada pihak terkait untuk peningkatan capaian program di Dinas Kesehatan kabupaten.

## LAMPIRAN

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015**

PROVINSI : Sulawesi Barat

NAMA SKPD : (Dinas Kesehatan)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Kesehatan)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	<sup>1</sup>	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 9 program	75%	Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	<sup>2</sup>	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kegiatan APBD</li> <li>2. SOP Kegiatan APBN</li> <li>3. SOP LKPJ</li> <li>4. SOP LPPD</li> <li>5. SOP Monev</li> <li>6. SOP Pembuatan Laporan Evaluasi Renja</li> <li>7. SOP Pembuatan Laporan Realisasi Bulanan</li> <li>8. SOP Pembuatan Surat Pengantar</li> <li>9. SOP Pengantaran Surat dan Laporan</li> <li>10. SOP Surat Keluar</li> <li>11. SOP Surat Masuk</li> <li>12. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Ganti</li> <li>13. Penyesuaian Gaji Berkala Pegawai</li> <li>14. Penyesuaian Gaji Kenaikan Pangkat Pegawai</li> <li>15. Penyesuaian Tunjangan</li> </ol>	Ada SOP Permintaan Obat	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

<sup>1</sup> Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Keluarga Pegawai 16. Pengampraan Perpindahan Gaji Pegawai 17. Pengampraan Gaji CPNS 18. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-TU) 19. Permohonan CPNS menjadi PNS 20. Permohonan Cuti Alasan Penting dan Haji 21. Mutasi Pindah PNS antar UPT 22. Penempatan Dokter-Dokter Gigi PTT 23. Pengangkatan dan Penempatan Bidan PTT 24. Pengusulan Mutasi Pindah PNS 25. Pengusulan Ujian Dinas 26. SOP Pembuatan Izin/Tugas Belajar, PPDS-PPDSG 27. SOP Stya Lencana 28. SOP Usul Pensiun 29. SOP Penanganan Surat Keluar 30. SOP Surat Masuk 31. SOP Pembuatan SK Kegiatan Kadis yang ttd 32. SOP Melaksanakan dan Menyusun Laporan Kegiatan terkait Program Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Darah dan Pelayanan Kesehatan di DTPK 33. SOP Mencatat dan mengarsipkan surat masuk 34. SOP Mencatat dan mengarsipkan surat Keluar 35. SOP Membuat Konsep surat		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Keluar Seksi Yandas 36. SOP Membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan MONEV 37. SOP Mengikuti pertemuan / rapat sesuai dengan program terkait 38. SOP Melakukan input dan analisa data 39. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan 40. SOP Pelaksanaan Konsultasi 41. SOP Persiapan Pembinaan Program BOK Kabupaten 42. SOP Persiapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi 43. SOP Penanganan Surat Masuk 44. SOP Pembuatan SK dan jadwal kegiatan		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang dilaksanakan SKPD)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan urusan	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak ----.</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM</li> </ul>	Tidak ada	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 27</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 27</li> </ul>	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	Ada Dokter Umum 2 orang, Dokter Gigi 1 orang, Perawat umum 2 orang,	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
							Perawat Gigi 1 orang, Apoteker 1 orang, rekam medis 1 orang	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 131 personil  - Total PNS Kabupaten, sebanyak ..... personil	.....	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 27 org.  - Pejabat yang ada, sebanyak 27 org.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan keangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan keangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi keangkatan, sebanyak 27 org.  - Jabatan yang ada, sebanyak -- -27 org	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2013	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015 , sebanyak 7 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Dinas Kesehatan 2. Renja Dinas Kesehatan 3. RKA APBD Dinas Kesehatan 4. DPA APBD Dinas Kesehatan 5. RKA-P Dinas Kesehatan 6. DPPA Dinas Kesehatan 7. RKAKL Dekonsentrasi	7 jenis dokumen	



ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPDP yang TIDAK diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 14 Program	14,29%	Mengacu dokumen RKPDP tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
	Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 13program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 13 Program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 13 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 13 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>						
	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 24.373.754.644,50 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 25.330.171.241	96,22%	Mengacu APBD tahun 2015 terakhir.
	Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 824.161.072 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 25.316.611.986	3,25%	
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 249.561.266 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 16.498.338.489	0,03%	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 249.561.266 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 27.653.645.882	0,90%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 4 jenis, sbb:  1. Laporan Keuangan Bulanan 2. Laporan Keungan Triwulanan 3. Laporan keuangan semesteran (CALK) 4. Laporan keuangan Tahunan	Ada	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Inventarisasi barang atau asset di dinas Kesehatan ada 15 dengan rincian dokumen sbb : 1. Kartu Inventaris barang A- F 2. Buku Inventaris 3. Buku Barang Inventaris 4. Buku barang pakai habis 5. Kartu inventaris ruangan 6. Kartu pemeliharaan 7. Laporan mutasi barang 8. Laporan pengguna barang 9. Nilai perolehan 10. Penerimaan barang 11. Pengadaan barang 12. RKBU 13. Rekapitulasi Buku Inventaris 14. Daftar barang rusak	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 292.552.455 - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp 6.664.192.267	4,39%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet	Jumlah sebanyak 7 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				1. Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		3. Pengumuman Mas Media. 4. Website 5. Facebook 6. TV 7. Koran		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik		tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015**

PROVINSI : Sulawesi Barat  
NAMA SKPD : (Dinas Kesehatan)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	<b>KESELARASAN DAN EFEKTIFITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH</b>	Implementasi standar Pelayanan Minimal (SPM)	6	Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh pemerintahan	Total Urusan Yang Sudah Ditetapkan SPM Pada Seluruh Kab/Kota Dibagi Jumlah Kab/Kota Yang Wajib Menyampaikan LPPD X 100 %	1. Kab Majene = 12 Urusan 2. Kab. Polewali = 12 Urusan 3. Kab. Mamasa = 12 Urusan 4. Kab. Mamuju = 12 Urusan 5. Kab. Mamuju Utara = 12 Urusan	75%	Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN**  
**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN**  
**DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015**

PROVINSI : Sulawesi Barat  
 NAMA SKPD : (Dinas Kesehatan)

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
<b>URUSAN WAJIB</b>						
2	<b>Kesehatan</b>	15	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	$\frac{3.839}{5.800} \times 100\%$	66,19%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{22.003}{27.549} \times 100\%$	79,87%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		17	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{399}{589} \times 100\%$	67,74%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		18	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	$\frac{168}{168} \times 100\%$	100%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{1.166}{1.735} \times 100\%$	67,20%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		20	Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{649}{649} \times 100\%$	100%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		21	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	$\frac{105.654}{314.516} \times 100\%$	33,59%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		22	Cakupan kunjungan bayi	$\frac{23.202}{26.273} \times 100\%$	88,31%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Kesehatan

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (FISIK DAN KEUANGAN)

SUMBER DANA : APBD PROVINSI SULAWESI BARAT

KONDISI BULAN : DESEMBER 2015

Unit Kerja : DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT  
 Bulan : DESEMBER 2015  
 Sumber Dana : APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOL	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT KEGIATAN	REALISASI					SISA PAGU ANGGARAN	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET.	
						FISIK		KEUANGAN							
						%	TTB	RP	(%)	TTB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>BELANJA</b>														
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			<b>8.109.105.591,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>7.963.101.680,00</b>	<b>98,20</b>		<b>146.003.911,00</b>				
	<b>1 Belanja Pegawai</b>														
	Gaji dan Tunjangan	12 Bln	Provinsi	6.110.235.273,00	75,35	100,00	75,35	5.990.957.307	98,05	73,88	119.277.966				
	Tambahan Penghasilan PNS	12 Bln	Provinsi	1.998.870.318,00	24,65	100,00	24,65	1.972.144.373	98,66	24,32	26.725.945				
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			<b>24.373.754.644,50</b>	<b>100,00</b>		<b>79,18</b>	<b>17.883.326.877,00</b>	<b>73,37</b>		<b>6.490.427.767,50</b>				
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>1.523.259.027</b>	<b>6,25</b>		<b>5,58</b>	<b>1.220.534.903</b>	<b>80,13</b>		<b>302.724.124</b>				
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	Provinsi	66.200.000	0,27	100,00	0,27	59.391.647	89,72	0,24	6.808.353				
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	Provinsi	208.920.000	0,86	100,00	0,86	148.481.805	71,07	0,61	60.438.195				
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bln	Provinsi	45.000.000	0,18	100,00	0,18	4.614.000	10,25	0,02	40.386.000				
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bln	Provinsi	29.040.000	0,12	100,00	0,12	29.040.000	100,00	0,12	-				
	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bln	Provinsi	66.600.000	0,27	100,00	0,27	22.868.000	34,34	0,09	43.732.000				
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	37 Item	Provinsi	73.563.000	0,30	100,00	0,30	73.440.000	99,83	0,30	123.000				
	7 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	12 Bln	Provinsi	37.000.200	0,15	100,00	0,15	36.098.700	97,56	0,15	901.500				
	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Pt	Provinsi	5.985.000	0,02	100,00	0,02	5.880.000	98,25	0,02	105.000				
	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan	12 Bln	Provinsi	6.360.000	0,03	100,00	0,03	4.020.000	63,21	0,02	2.340.000				
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bln	Provinsi	54.000.000	0,22	100,00	0,22	53.910.251	99,83	0,22	89.749				
	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Th	Provinsi	551.074.600	2,26	80,00	1,81	505.977.500	91,82	2,08	45.097.100				
	12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	6 Kab	Provinsi	319.516.227	1,31	83,33	1,09	226.813.000	70,99	0,93	92.703.227				
	13 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak	12 Bln	Provinsi	60.000.000	0,25	100,00	0,25	50.000.000	83,33	0,21	10.000.000				
	14 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	12 Bln	UPTD Poliklinik	19.200.000	0,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	19.200.000				
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>563.612.500</b>	<b>2,31</b>		<b>2,07</b>	<b>481.661.266</b>	<b>85,46</b>		<b>81.951.234</b>				
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Pt	Provinsi	300.350.000	1,23	80,00	0,99	232.100.000	77,28	0,95	68.250.000				
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Pt	Provinsi	10.000.000	0,04	100,00	0,04	7.010.000	70,10	0,03	2.990.000				
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 Th	Provinsi	158.800.000	0,65	100,00	0,65	148.243.326	93,35	0,61	10.556.674				
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Th	Provinsi	94.462.500	0,39	100,00	0,39	94.307.940	99,84	0,39	154.560				
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>210.040.000</b>	<b>0,86</b>		<b>0,86</b>	<b>209.050.000</b>	<b>99,53</b>		<b>990.000</b>				
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	180 Psg	Provinsi	210.040.000	0,86	100,00	0,86	209.050.000	99,53	0,86	990.000				
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>120.000.000</b>	<b>0,49</b>		<b>0,30</b>	<b>60.000.000</b>	<b>50,00</b>		<b>60.000.000</b>				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOL	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT KEGIATAN	REALIASI					SISA PAGU ANGGARAN	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET.	
						FISIK		KEUANGAN							
						%	TTB	RP	(%)	TTB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	Th	Provinsi	120.000.000	0,49	60,00	0,30	60.000.000	50,00	0,25	60.000.000			
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>593.579.900</b>	<b>2,44</b>		<b>2,44</b>	<b>490.636.000</b>	<b>82,66</b>		<b>102.943.900</b>			
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dok	Provinsi	2.000.000	0,01	100,00	0,01	2.000.000	100,00	0,01	-			
	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1	Dok	Provinsi	9.340.000	0,04	100,00	0,04	9.278.000	99,34	0,04	62.000			
	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dok	Provinsi	10.230.000	0,04	100,00	0,04	9.875.000	96,53	0,04	355.000			
	4 Penyusunan RKA/DPA-SKPD	1	Dok	Provinsi	19.850.000	0,08	100,00	0,08	19.075.000	96,10	0,08	775.000			
	5 Penyusunan RKA-P / DPPA-SKPD	1	Dok	Provinsi	29.460.000	0,12	100,00	0,12	29.460.000	100,00	0,12	-			
	6 Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12	Bln	Provinsi	48.000.000	0,20	100,00	0,20	40.000.000	83,33	0,16	8.000.000			
	7 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban SKPD	1	Dok	Provinsi	2.000.000	0,01	100,00	0,01	2.000.000	100,00	0,01	-			
	8 Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan	2	Dok	Provinsi	56.650.000	0,23	100,00	0,23	54.417.000	96,06	0,22	2.233.000			
	9 Bimbingan Teknis Penyusunan Pertanggungjawaban Belanja	1	Dok	Provinsi	317.379.900	1,30	100,00	1,30	245.476.000	77,34	1,01	71.903.900			
	10 Penyusunan Laporan pertanggung Jawaban bulanan bendahara	12	Dok	Provinsi	25.440.000	0,10	100,00	0,10	21.748.000	85,49	0,09	3.692.000			
	11 Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut LHP	6	Kab	6 Kab	73.230.000	0,30	100,00	0,30	57.307.000	78,26	0,24	15.923.000			
<b>6</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>				<b>3.137.385.400</b>	<b>12,87</b>		<b>8,99</b>	<b>1.677.165.142</b>	<b>53,46</b>		<b>1.460.220.258</b>			
	1 Monitoring Farmasi Komunitas dan Klinik di Rumah Sakit	6	Kab	6 Kab	88.740.000	0,36	33,33	0,12	18.250.000	20,57	0,07	70.490.000			
	2 Pertemuan Penggunaan Anti Biotika yang Rasional	25	Org	Provinsi	144.865.600	0,59	100,00	0,59	143.010.600	98,72	0,59	1.855.000			
	3 Penyediaan Data Stock Obat di Instalasi Farmasi	12	Bln	UPTD IFP	15.600.000	0,06	100,00	0,06	9.600.000	61,54	0,04	6.000.000			
	4 Pengadaan Obat Buffer Stock IFP Sulawesi Barat	1	Pt	Provinsi	650.540.000	2,67	50,00	1,33	317.748.770	48,84	1,30	332.791.230			
	5 Penyediaan Operasional di IFP	1	Pt	UPTD IFP	110.917.000	0,46	40,00	0,18	39.230.700	35,37	0,16	71.686.300			
	6 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat	6	Kab	6 Kab	38.605.000	0,16	50,00	0,08	14.704.500	38,09	0,06	23.900.500			
	7 Distribusi Obat	6	Kab	6 Kab	18.310.000	0,08	16,67	0,01	1.905.000	10,40	0,01	16.405.000			
	8 Pelayanan Kefarmasian	1	Pt	UPTD IFP	1.133.706.000	4,65	70,00	3,26	587.661.072	51,84	2,41	546.044.928			
	9 Harmonisasi Pegelolaan Obat dalam rangka Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	108	Org	Provinsi	233.370.000	0,96	100,00	0,96	174.373.400	74,72	0,72	58.996.600			
	10 Pembekalan Teknik Tenaga Kesehatan (Apoteker) di RS tentang Visite, Konseling, dan PIO dan Evaluasi Hasil Kegiatan	22	Org	Provinsi	97.230.000	0,40	100,00	0,40	85.277.600	87,71	0,35	11.952.400			
	11 Advokasi Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian dalam JKN	35	Org	Provinsi	73.031.800	0,30	100,00	0,30	72.311.800	99,01	0,30	720.000			
	12 Pertemuan Evaluasi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	35	Org	Provinsi	75.780.000	0,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	75.780.000			
	13 Pertemuan Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di PKM dan Pemantauan Hasil Kegiatan	98	Org	Provinsi	274.960.000	1,13	100,00	1,13	109.599.700	39,86	0,45	165.360.300			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOL	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT KEGIATAN	REALIASI					SISA PAGU ANGGARAN	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET.		
						FISIK		KEUANGAN								
						%	TTB	RP	(%)	TTB						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	14	Pembekalan Tenaga Kesehatan tentang Bahan Tambahan Pangan / Makanan dan Evaluasi ke IRTP	39	Org	Provinsi	90.480.000	0,37	84,62	0,31	68.952.000	76,21	0,28	21.528.000			
	15	Pemantauan Indikator Penggunaan Obat Rasional (ISPA Non Pneumoni, Diare Non Spesifik dan Myalgia di PKM	3	KI	6 Kab	91.250.000	0,37	66,67	0,25	34.540.000	37,85	0,14	56.710.000			
<b>7</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>					<b>603.790.000</b>	<b>2,48</b>		<b>2,45</b>	<b>515.523.500</b>	<b>85,38</b>		<b>88.266.500</b>			
	1	Penguatan Program Kesehatan Kerja Lintas Sektor Formal dan Informal di Kabupaten	23	Org	Provinsi	70.790.000	0,29	100,00	0,29	64.743.500	91,46	0,27	6.046.500			
	2	Monev Program Pembinaan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	6	Kab	6 Kab	32.620.000	0,13	83,33	0,11	21.645.000	66,35	0,09	10.975.000			
	3	Lomba TOGA Tk. Provinsi Sulawesi Barat	6	Kab	6 Kab	76.820.000	0,32	100,00	0,32	64.435.000	83,88	0,26	12.385.000			
	4	Pelatihan Pos UKK bagi Petugas Puskesmas dan Kader Kabupaten	40	Org	Provinsi	148.500.000	0,61	100,00	0,61	119.240.000	80,30	0,49	29.260.000			
	5	Pelatihan Asuhan Mandiri bagi Peugas Kesehatan	24	Org	BKTM Makassar	275.060.000	1,13	100,00	1,13	245.460.000	89,24	1,01	29.600.000			
<b>8</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>					<b>413.440.000</b>	<b>1,70</b>		<b>1,12</b>	<b>191.869.500</b>	<b>46,41</b>		<b>221.570.500</b>			
	1	Peningkatan Pengawasan Kemanan Pangan dan Bahan Berbahaya	150	Sarana	6 Kab	155.840.000	0,64	10,00	0,06	13.324.000	8,55	0,05	142.516.000			
	2	Pembinaan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	132	Org	Provinsi	257.600.000	1,06	100,00	1,06	178.545.500	69,31	0,73	79.054.500			
<b>9</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>					<b>314.670.000</b>	<b>1,29</b>		<b>1,29</b>	<b>271.880.000</b>	<b>86,40</b>		<b>42.790.000</b>			
	1	Pembinaan Desa Siaga Aktif	6	KI	Provinsi	123.020.000	0,50	100,00	0,50	107.050.000	87,02	0,44	15.970.000			
	2	Pertemuan Koordinasi Pokjandal Desa/Kelurahan Siaga Aktif	6	KI	Provinsi	108.510.000	0,45	100,00	0,45	89.495.000	82,48	0,37	19.015.000			
	3	Pertemuan Koordinasi dengan LP/LS Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah	1	KI	Provinsi	83.140.000	0,34	100,00	0,34	75.335.000	90,61	0,31	7.805.000			
<b>10</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>					<b>1.581.535.000</b>	<b>6,49</b>		<b>6,25</b>	<b>1.262.778.200</b>	<b>79,85</b>		<b>318.756.800</b>			
	1	Penyusunan Peta informasi Masyarakat Kurang Gizi	2	Peta	Provinsi	103.730.000	0,43	100,00	0,43	75.458.000	72,74	0,31	28.272.000			
	2	Monitoring dan Evaluasi Program Gizi	6	Kab	6 Kab	41.485.000	0,17	50,00	0,09	9.360.000	22,56	0,04	32.125.000			
	3	Workshop Percepatan Perbaikan Gizi	128	Org	Provinsi	334.770.000	1,37	93,75	1,29	298.951.400	89,30	1,23	35.818.600			
	4	Pelatihan PMBA	40	Org	Desa Bangun Mandar	151.640.000	0,62	100,00	0,62	136.590.000	90,08	0,56	15.050.000			
	5	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pemetaan Masalah Gizi di Daerah Bangun Mandar	2	Kab	Daerah Prog. Bangun Mandar	195.285.000	0,80	100,00	0,80	164.270.000	84,12	0,67	31.015.000			
	6	Pembahasan Rancangan Peraturan Ddaerah Air Susu Ibu (ASI)	1	Dok	Provinsi	240.170.000	0,99	100,00	0,99	144.570.000	60,19	0,59	95.600.000			
	7	Pertemuan Komitmen Peningkatan IMD dan ASI Eksklusif	40	Org	Provinsi	116.905.000	0,48	92,50	0,44	105.123.800	89,92	0,43	11.781.200			
	8	TOT Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	20	Org	Provinsi	74.680.000	0,31	100,00	0,31	59.140.000	79,19	0,24	15.540.000			
	9	Pelatihan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	60	Org	Majene, Mateng	128.640.000	0,53	100,00	0,53	98.315.000	76,43	0,40	30.325.000			



NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOL	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT KEGIATAN	REALIASI					SISA PAGU ANGGARAN	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET.	
						FISIK		KEUANGAN							
						%	TTB	RP	(%)	TTB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	10	Pelayanan Gizi dan KIA Ibu Hamil KEK di Kbab. Mamuju Utara	125 Org	Mamuju Utara	194.230.000	0,80	96,00	0,77	171.000.000	88,04	0,70	23.230.000			
<b>11</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>				<b>1.477.132.000</b>	<b>6,06</b>		<b>3,72</b>	<b>815.218.000</b>	<b>55,19</b>		<b>661.914.000</b>			
	1	Pemicuan Jamban Sehat	4 Kab	Mamasa, Mamuju, Matra, Majene	871.460.000	3,58	50,00	1,79	347.970.000	39,93	1,43	523.490.000			
	2	Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis untuk Sanitarian RS	18 Org	Provinsi	95.170.000	0,39	100,00	0,39	81.053.800	85,17	0,33	14.116.200			
	3	Pelatihan Teknis Pemeriksaan Kualitas Air bagi Sanitarian	25 Org	Provinsi	164.702.000	0,68	100,00	0,68	153.341.200	93,10	0,63	11.360.800			
	4	Pelatihan Fasilitator STBM	34 Org	Provinsi	183.770.000	0,75	100,00	0,75	154.333.000	83,98	0,63	29.437.000			
	5	Monitoring dan Evaluasi Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	6 Kab	6 Kab	81.270.000	0,33	33,33	0,11	22.660.000	27,88	0,09	58.610.000			
	6	Sosialisasi/Kampanye CTPS	6 Kab	6 Kab	79.740.000	0,33	0,00	0,00	55.860.000	70,05	0,23	23.880.000			
	7	Penyediaan Data STBM dan HSP Program Sanitasi dan Lingkungan Sehat	2 Dok	Provinsi	1.020.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.020.000			
<b>12</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>				<b>2.465.429.500</b>	<b>10,12</b>		<b>7,43</b>	<b>1.455.955.700</b>	<b>59,05</b>		<b>1.009.473.800</b>			
	1	Investigasi dan Penanggulangan KLB	6 Kab	Provinsi	42.162.445	0,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	42.162.445			
	2	Fasilitasi cool Room	1 Th	Provinsi	137.250.000	0,56	40,00	0,23	34.700.000	25,28	0,14	102.550.000			
	3	Sweeping Program Imunisasi	6 Kab	6 Kab	34.020.000	0,14	100,00	0,14	22.638.000	66,54	0,09	11.382.000			
	4	Distribusi Vaksin	6 Kab	6 Kab	10.000.000	0,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	10.000.000			
	5	Pertemuan Evaluasi Program Imunisasi	33 Org	Provinsi	142.890.000	0,59	100,00	0,59	83.930.400	58,74	0,34	58.959.600			
	6	Bimbingan Teknis Surveilans	6 Kab	6 Kab	31.120.000	0,13	33,33	0,04	9.290.000	29,85	0,04	21.830.000			
	7	Pembinaan Kesehatan Matra	6 Kab	6 Kab	31.280.000	0,13	100,00	0,13	22.780.000	72,83	0,09	8.500.000			
	8	Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Matra	6 Kab	6 Kab	58.720.000	0,24	50,00	0,12	19.630.000	33,43	0,08	39.090.000			
	9	Bimbingan Teknis PD3I	6 Kab	6 Kab	45.140.000	0,19	100,00	0,19	34.986.000	77,51	0,14	10.154.000			
	10	Pelatihan Teknis dan Manajemen Pos TB Desa	34 Org	Provinsi	91.260.000	0,37	100,00	0,37	70.440.000	77,19	0,29	20.820.000			
	11	Pencetakan Format Pencatatan dan Pelaporan TB	6 Pt	Provinsi	42.040.000	0,17	100,00	0,17	41.290.000	98,22	0,17	750.000			
	12	Pertemuan Koordinasi Petugas Surveilans KLB se-Provinsi Sulawesi Barat	1 Kl	Provinsi	76.820.000	0,32	100,00	0,32	50.473.400	65,70	0,21	26.346.600			
	13	Pertemuan Kesiapsiagaan Masalah Krisis Kesehatan se-Provinsi Sulawesi Barat	1 Kl	Provinsi	106.115.000	0,44	100,00	0,44	94.790.300	89,33	0,39	11.324.700			
	14	Pembuatan Media Informasi dan publikasi surveilans KLB	480 Eks	Provinsi	48.000.000	0,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	48.000.000			
	15	Logistik Status Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	1 Pt	Provinsi	25.000.000	0,10	0,00	0,00	-	0,00	0,00	25.000.000			
	16	Pelatihan pemberian Imunisasi TT Wanita Usia Subur 5 Dosis	28 Org	Provinsi	-	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-			
	17	Peningkatan Pengetahuan Petugas Pengelola Program DBD/Arbovirosis	35 Org	Provinsi	129.610.000	0,53	85,71	0,46	104.124.100	80,34	0,43	25.485.900			
	18	Pelacakan Kasus Filariasis	6 Kab	6 Kab	53.680.000	0,22	50,00	0,11	22.830.000	42,53	0,09	30.850.000			
	19	Monitoringn Massal Evaluasi Pasca Pengobatan Massal (POMPFI) Program Filariasis	2 Kab	6 Kab	29.820.000	0,12	50,00	0,06	7.090.000	23,78	0,03	22.730.000			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOL	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT KEGIATAN	REALIASI					SISA PAGU ANGGARAN	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET.	
						FISIK		KEUANGAN							
						%	TTB	RP	(%)	TTB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	20	Pelacakan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies	6 Kab	6 Kab	41.785.000	0,17	33,33	0,06	9.050.000	21,66	0,04	32.735.000			
	21	Workshop Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok	69 Org	Provinsi	174.270.000	0,71	100,00	0,71	118.242.000	67,85	0,49	56.028.000			
	22	Pertemuan Evaluasi Program ISPA dan Pneumonia	32 Org	Provinsi	126.700.000	0,52	100,00	0,52	118.411.600	93,46	0,49	8.288.400			
	23	Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Pengelola Program Pengendalian Vektor	33 Org	Provinsi	118.405.000	0,49	100,00	0,49	87.073.650	73,54	0,36	31.331.350			
	24	Pemetaan Vektor Malaria di Daerah Endemis	6 Kab	6 Kab	57.725.250	0,24	100,00	0,24	41.445.750	71,80	0,17	16.279.500			
	25	Pertemuan Peningkatan Kader Pemantau dan Pengendali Jentik	6 Kab	Provinsi	130.305.000	0,53	83,33	0,45	81.120.000	62,25	0,33	49.185.000			
	26	Bimbingan Teknis Kader Posmaldes	6 Kab	6 Kab	45.310.250	0,19	50,00	0,09	21.120.000	46,61	0,09	24.190.250			
	27	Pelacakan Kasus Malaria	6 Kab	6 Kab	164.886.000	0,68	50,00	0,34	58.291.500	35,35	0,24	106.594.500			
	28	Pengadaan Abate	1 Pt	Provinsi	-	0,00	100,00	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-			
	29	Pemeriksaan Kontak Kusta	1 Keg	Provinsi	83.290.000	0,34	100,00	0,34	61.950.000	74,38	0,25	21.340.000			
	30	Pelatihan TIM Layanan Komprehensif Berkesinambungan HIV/AIDS dan IMS	1 Keg	Provinsi	206.090.000	0,85	100,00	0,85	178.480.000	86,60	0,73	27.610.000			
	31	Peningkatan Kapasitas Petugas Imunisasi pada Pemberian TT WUS 5 Dosis	1 Keg	Provinsi	89.185.555	0,37	100,00	0,37	61.779.000	69,27	0,25	27.406.555			
	32	Pengadaan Insektisida Cair	1 Pt	Provinsi	92.550.000	0,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	92.550.000			
<b>13</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>				<b>5.423.821.300</b>	<b>22,25</b>		<b>14,26</b>	<b>4.153.080.950</b>	<b>76,57</b>		<b>1.270.740.350</b>			
	1	Manajemen Fasilitas Kesehatan	43 Org	Provinsi	130.064.200	0,53	100,00	0,53	130.064.200	100,00	0,53	-			
	2	Emergency Nursing Intermediate Level	1 Keg	Provinsi	226.480.000	0,93	100,00	0,93	192.863.800	85,16	0,79	33.616.200			
	3	Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Keg	Provinsi	-	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-			
	4	Penyusunan Profil RS	1 Kl	Provinsi	102.000.000	0,42	100,00	0,42	73.005.000	71,57	0,30	28.995.000			
	5	Pelatihan Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Medis	22 Org	Provinsi	156.810.000	0,64	100,00	0,64	135.987.800	86,72	0,56	20.822.200			
	6	Visitasi Penetapan dan Peningkatan Kelas RS	1 Pt	Provinsi	82.645.000	0,34	50,00	0,17	18.807.000	22,76	0,08	63.838.000			
	7	Workshop Penyusunan Dokumen Tata Kelola Keuangan RS	19 Org	Provinsi	85.035.400	0,35	100,00	0,35	84.885.400	99,82	0,35	150.000			
	8	Peningkatan Kapasitas Teknis bagi Petugas UTD	23 Org	Provinsi	372.677.000	1,53	100,00	1,53	331.197.300	88,87	1,36	41.479.700			
	9	Peningkatan Kapasitas Teknis Tim PONED	21 Org	Provinsi	236.504.000	0,97	100,00	0,97	227.864.000	96,35	0,93	8.640.000			
	10	Konsultasi pusat Program Pelayanan Kesehatan Dasar	3 Kl	Provinsi	47.406.000	0,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	47.406.000			
	11	Monev Terpadu Kesiapan Pelayanan Kesehatan	6 Kab	6 Kab	136.301.600	0,56	50,00	0,28	46.950.500	34,45	0,19	89.351.100			
	12	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD Poliklinik	1 Th	Provinsi	549.500.000	2,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	549.500.000			
	13	Workshop Penyusunan Rencana Strategik Bisnis BLUD PKM	30 Org	Provinsi	-	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-			
	14	Workshop Penyusunan SPM dalam rangka BLUD di PKM	40 Org	Provinsi	150.726.800	0,62	100,00	0,62	150.726.800	100,00	0,62	-			
	15	Pelatihan Petugas Laboratorium PKM Tingkat Lanjut	11 Org	Provinsi	-	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOL	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT KEGIATAN	REALIASI					SISA PAGU ANGGARAN	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET.		
						FISIK		KEUANGAN								
						%	TTB	RP	(%)	TTB						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	16	Peningkatan Kapasitas Teknis Dokter Gigi PKM Era JKN	30	Org	Provinsi	149.505.000	0,61	100,00	0,61	125.575.000	83,99	0,52	23.930.000			
	17	Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana di Kabupaten	24	Org	Provinsi	66.200.000	0,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	66.200.000			
	18	Peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan di DTPK	300	Org	Provinsi	394.040.000	1,62	83,33	1,35	291.224.000	73,91	1,19	102.816.000			
	19	Training of Trainers Emergency Nursing	30	Org	Provinsi	-	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-			
	20	Pengembangan Institusi Wajib Laport Napza di Sarana Kesehatan	44	Org	Provinsi	132.530.000	0,54	100,00	0,54	121.846.700	91,94	0,50	10.683.300			
	21	Rapat Koordinasi Pelaksanaan PERKESMAS	50	Org	Provinsi	128.358.700	0,53	100,00	0,53	128.358.700	100,00	0,53	-			
	22	Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Penerapan Asuhan Kebidanan dengan Pendekatan Sayang Ibu dan Bayi	30	Org	Provinsi	176.052.100	0,72	100,00	0,72	175.887.100	99,91	0,72	165.000			
	23	Peningkatan Kapasitas Petugas Call Centre dalam Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu	40	Org	Provinsi	124.495.100	0,51	100,00	0,51	124.195.100	99,76	0,51	300.000			
	24	Pemutakhiran Data dalam rangka Penyusunan Profil Kesehatan Rujukan	30	Org	Provinsi	93.687.400	0,38	100,00	0,38	93.687.400	100,00	0,38	-			
	25	Penyusunan SOP dan Pola Pembinaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)	30	Org	Provinsi	120.695.000	0,50	100,00	0,50	96.642.000	80,07	0,40	24.053.000			
	26	Bimbingan dan Survey Akreditasi RS	240	Org	Provinsi	237.290.900	0,97	100,00	0,97	229.640.900	96,78	0,94	7.650.000			
	27	Peningkatan Kapasitas Tim PONEK Rumah Sakit	30	Org	Provinsi	315.420.000	1,29	100,00	1,29	309.750.000	98,20	1,27	5.670.000			
	28	Pengembangan SIM RS Open Source and e-Medical Record di RS	37	Org	Provinsi	98.687.100	0,40	100,00	0,40	98.687.100	100,00	0,40	-			
	29	Optimalisasi Pelaksanaan Clinical Pathway di Rumah Sakit	37	Org	Provinsi	120.995.000	0,50	100,00	0,50	107.365.000	88,74	0,44	13.630.000			
	30	Benchmarking Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Kl	Provinsi	77.450.000	0,32	100,00	0,32	49.000.000	63,27	0,20	28.450.000			
	31	Bimbingan dan Survey Akreditasi Program Khusus	1	Keg	Provinsi	74.275.000	0,30	100,00	0,30	66.940.800	90,13	0,27	7.334.200			
	32	Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Pokok BLUD PKM	1	Keg	Provinsi	187.250.000	0,77	100,00	0,77	153.504.650	81,98	0,63	33.745.350			
	33	Lokakarya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal RS	1	Keg	Provinsi	134.700.000	0,55	100,00	0,55	120.348.300	89,35	0,49	14.351.700			
	34	Workshop Total Quality Manajemen Rumah Sakit	1	Keg	Provinsi	160.055.000	0,66	100,00	0,66	146.345.000	91,43	0,60	13.710.000			
	35	Manajemen Keperawatan di Pelayanan Kesehatan Primer	1	Keg	Provinsi	163.545.000	0,67	100,00	0,67	152.431.400	93,20	0,63	11.113.600			
	36	Pelatihan Petugas Laboratorium Tingkat Lanjut	1	Keg	Provinsi	192.440.000	0,79	100,00	0,79	169.300.000	87,98	0,69	23.140.000			
<b>14</b>	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>					<b>3.498.969.000</b>	<b>14,36</b>		<b>13,79</b>	<b>2.850.320.800</b>	<b>81,46</b>		<b>648.648.200</b>			
	1	Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak	35	Org	Provinsi	83.330.000	0,34	100,00	0,34	73.950.000	88,74	0,30	9.380.000			
	2	Pertemuan Audit Maternal Perinatal	30	Org	Mamuju	94.415.000	0,39	100,00	0,39	72.345.000	76,62	0,30	22.070.000			
	3	Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan Komplikasi dengan P4K bagi Masyarakat	300	Org	Polman	167.940.000	0,69	100,00	0,69	157.880.000	94,01	0,65	10.060.000			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOL	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT KEGIATAN	REALIASI					SISA PAGU ANGGARAN	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET.
						FISIK		KEUANGAN						
						%	TTB	RP	(%)	TTB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Workshop Peningkatan Kesehatan Reproduksi	300 Org	Polman	193.190.000	0,79	96,67	0,77	183.340.000	94,90	0,75	9.850.000			
5	Peningkatan Kemampuan Petugas dalam APN	80 Org	Makassar	546.430.000	2,24	100,00	2,24	526.054.100	96,27	2,16	20.375.900			
6	Monev Program kesehatan Ibu dan Anak	6 Kab	6 Kab	101.120.000	0,41	16,67	0,07	6.890.000	6,81	0,03	94.230.000			
7	Advokasi Pelaksanaan P4K, kemitraan Bidan dan Dukun dan RTK	30 Org	Mamuju	85.095.000	0,35	83,33	0,29	60.760.000	71,40	0,25	24.335.000			
8	Peningkatan Kemampuan Petugas dalam SDIDTK	60 Org	Provinsi	241.320.000	0,99	100,00	0,99	198.910.000	82,43	0,82	42.410.000			
9	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Kelas Ibu Hamil dan Balita	30 Org	Provinsi	119.470.000	0,49	100,00	0,49	102.440.000	85,75	0,42	17.030.000			
10	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan tentang MTBS	60 Org	Provinsi	426.560.000	1,75	100,00	1,75	342.687.000	80,34	1,41	83.873.000			
11	Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Penjarangan Anak Sekolah	20 Org	Provinsi	96.240.000	0,39	100,00	0,39	75.370.000	78,31	0,31	20.870.000			
12	Orientasi Teknis Integrasi PAUD baagi Bidan	24 Org	Provinsi	93.015.000	0,38	100,00	0,38	54.030.000	58,09	0,22	38.985.000			
13	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pencatatan dan Pelaporan Program	60 Org	Provinsi	127.280.000	0,52	100,00	0,52	117.610.000	92,40	0,48	9.670.000			
14	Peningkatan Kemapan Petugas dalam Antenatal Care (ANC) Standar	40 Org	Provinsi	446.424.000	1,83	100,00	1,83	334.461.500	74,92	1,37	111.962.500			
15	Sosialisasi Penggunaan Buku KIA	300 Org	Polman	168.565.000	0,69	98,33	0,68	157.995.000	93,73	0,65	10.570.000			
16	Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan Komplikasi dengan P4K	57 Org	Mamuju Utara	142.755.000	0,59	78,95	0,46	73.825.000	51,71	0,30	68.930.000			
17	Sosialisasi Pelayanan MTBS Berbasis Masyarakat	300 Org	Polman	162.590.000	0,67	100,00	0,67	155.945.000	95,91	0,64	6.645.000			
18	Peningkatan Kapasitas Petugas Tentang Asfiksia dan BBLR	60 Org	Provinsi	203.230.000	0,83	100,00	0,83	155.828.200	76,68	0,64	47.401.800			
<b>15</b>	<b>Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan</b>			<b>521.790.000</b>	<b>2,14</b>		<b>1,94</b>	<b>365.749.000</b>	<b>70,10</b>		<b>156.041.000</b>			
1	Analisis Manfaat Pembiayaan BOK Terhadap Capaian MDG's Tahun 2015	1 Kl	Provinsi	165.500.000	0,68	100,00	0,68	132.104.000	79,82	0,54	33.396.000			
2	Pemantauan Pelaksanaan JKN dalam Upaya Pencapaian Universal Coverage di Fasilitasi Kesehatan Tk. Pratama	4 Kl	Provinsi	98.200.000	0,40	50,00	0,20	33.970.000	34,59	0,14	64.230.000			
3	Pertemuan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Tk. Provinsi	2 Kl	Provinsi	258.090.000	1,06	100,00	1,06	199.675.000	77,37	0,82	58.415.000			
<b>16</b>	<b>Program Kebijakan dan Management Pembangunan Kesehatan</b>			<b>919.070.000</b>	<b>3,77</b>		<b>3,16</b>	<b>593.697.200</b>	<b>64,60</b>		<b>325.372.800</b>			
1	Lokakarya Pengembangan Aset Daerah Terkait dengan Bidang Kesehatan	34 Org	Provinsi	75.890.000	0,31	88,24	0,27	54.180.000	71,39	0,22	21.710.000			
2	Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	30 Org	Provinsi	81.100.000	0,33	66,67	0,22	27.697.000	34,15	0,11	53.403.000			
3	Penyusunan Buku Laporan Tahunan MDG's	1 Dok	Provinsi	9.855.000	0,04	100,00	0,04	9.405.000	95,43	0,04	450.000			
4	Rapat Koordinasi, Evaluasi Pelaporan Bidang Kesehatan se-Provinsi	48 Org	Provinsi	238.020.000	0,98	100,00	0,98	140.245.000	58,92	0,58	97.775.000			
5	Rapat Evaluasi Program MDG's Bidang Kesehatan	46 Org	Provinsi	102.575.000	0,42	100,00	0,42	80.048.200	78,04	0,33	22.526.800			
6	Pengembangan Program Kesehatan Bangun Mandar	12 Pt	Provinsi	307.050.000	1,26	66,67	0,84	178.670.000	58,19	0,73	128.380.000			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOL	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT KEGIATAN	REALIASI					SISA PAGU ANGGARAN	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET.		
						FISIK		KEUANGAN								
						%	TTB	RP	(%)	TTB						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	7	Pertemuan Programm Bangun Mandar Sehat	40	Org	Provinsi	93.780.000	0,38	100,00	0,38	92.802.000	98,96	0,38	978.000			
	8	Penyusunan Juknis Bangun Sehat	1	Pt	Provinsi	10.800.000	0,04	100,00	0,04	10.650.000	98,61	0,04	150.000			
<b>17</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>					<b>773.638.918</b>	<b>3,17</b>		<b>2,38</b>	<b>574.097.100</b>	<b>74,21</b>		<b>199.541.818</b>			
	1	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas	6	Kab	6 Kab	63.206.000	0,26	100,00	0,26	48.876.000	77,33	0,20	14.330.000			
	2	Pembinaan dan Pengawasab Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis	1	Pt	Universitas	91.000.000	0,37	60,00	0,22	42.185.300	46,36	0,17	48.814.700			
	3	Sosialisasi dan Fasilitasi Aplikasi Pemetaan SDM Kesehatan	25	Org	Provinsi	65.675.000	0,27	100,00	0,27	64.046.200	97,52	0,26	1.628.800			
	4	Pelatihan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	30	Org	Provinsi	150.518.018	0,62	100,00	0,62	150.517.900	100,00	0,62	118			
	5	Pembekalan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	50	Org	Provinsi	200.072.000	0,82	96,00	0,79	165.139.800	82,54	0,68	34.932.200			
	6	Workshop Penyusunan SOP Administrasi Bidang Kesehatan	40	Org	Provinsi	53.762.900	0,22	100,00	0,22	53.762.900	100,00	0,22	-			
	7	Pertemuan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedure Dinas Kesehatan	1	Kl	Provinsi	66.325.000	0,27	100,00	0,27	49.569.000	74,74	0,20	16.756.000			
	8	Pemutakhiran data SDM Kesehatan di Kabupaten	1	Keg	Provinsi	83.080.000	0,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	83.080.000			
<b>18</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan</b>					<b>283.910.000,00</b>	<b>1,16</b>		<b>1,16</b>	<b>158.652.300,00</b>	<b>55,88</b>		<b>125.257.700,00</b>			
	1	Workshop Penyusunan Capaian SPM Kesehatan	39	Org	6 Kab	106.610.000	0,44	100,00	0,44	90.322.300	84,72	0,37	16.287.700			
	2	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	6	Kab	6 Kab	-	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-			
	3	Pengembangan SIK	12	Bln	Provinsi	139.750.000	0,57	100,00	0,57	38.330.000	27,43	0,16	101.420.000			
	4	Pencetakan Buku Informasi Kesehatan	3	Pt	Provinsi	37.550.000	0,15	100,00	0,15	30.000.000	79,89	0,12	7.550.000,00			
<b>JUMLAH (PROG ...&amp; KEG .....)</b>						<b>Rp 32.482.860.236</b>	<b>100,00</b>		<b>89,59</b>	<b>Rp 25.330.171.241</b>	<b>77,98</b>		<b>Rp 6.636.431.679</b>			

Mamuju, 14 Desember 2015  
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulbar

**Dr. H. ACHMAD AZIS, M.Kes**  
**NIP. 195905151989031016**

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

## KA. DINAS KESEHATAN

**Dr. H. Achmad Azis, M.kes**

Nip : 19590515 198903 1 016

### SEKRETARIS

MUZDALIPAH, SKM, M.KES  
Nip : 19700407 199803 1 007

### SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

JAILUDDIN, Spd.I  
Nip : 19601231 198603 1 500

### SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM & PELAPORAN

WAHYUDDIN, SE.M.Kes  
Nip : 197302142006041013

### SUB BAGIAN KEUANGAN & PERLENGKAPAN

Hj. MAHDIANA, B, SKM, MM  
Nip: 198007282003212008

### BIDANG BINA PELAYANAN KESEHATAN DASAR

dr. Hj. INDAHAWATI NURSYAMSI  
Nip : 196803062002122002

### BIDANG BINA PENGENDALIAN PENYAKIT & KESEHATAN LINGKUNGAN

dr. H. MUH. IKHWAN  
Nip: 197205012000121006

### BIDANG BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU ANAK

dr. Hj. NURSYAMSI R.HAMZAH  
Nip: 197002012002122006

### BIDANG PELAYANAN FARMASI DAN JAMINAN KESEHATAN

Dra. Hj. SUFIANI, Apt, M.Kes  
Nip: 196312311995032005

#### Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

dr.Hj. Darmawiyah  
Nip: 198009012006042019

#### Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Khusus & Pengembangan

A.Erieka Novianti,SKM.,M.Kes  
Nip: 19801101 200312 2 007

#### Seksi Sarana, Prasarana & Alkes

Sriyana Makkasau,SKM,M.Kes  
Nip: 197512092006042017

#### Seksi Pengendalian Penyakit

Dr. Hj. Marintani Erna  
Nip: 196905242003122004

#### Seksi Surveilans, Imunisasi & Kesehatan Matra

Sri Surianti, SKM, M.Kes  
Nip: 197708152006042029

#### Seksi Kesehatan Lingkungan

Syarifuddin Hamal, SKM, M.Kes  
Nip :195909171985031027

#### Seksi Gizi

Sofiawaty Sofyan,SP.M.Kes  
Nip: 19740725 200604 2 028

#### Seksi Kesehatan Ibu dan Anak

Andi Tenri Bulaeng,STP,M.Kes  
Nip: 197504142006042033

#### Seksi Kestrad, Alternatif, Komplementer & Kesehatan Kerja

Nuraeni Amir, SKM  
Nip: 198210302008042002

#### Kasie Kefarmasian, Makanan dan Minuman

Muh. Tamsil, SKM  
Nip: 19700201 1991011001

#### Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Nana Darmania, S.Sos, M.Kes  
Nip :197412252007012025

#### Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Firman Gazali, SKM, M.Kes  
Nip: 197712262006041013

### UPTD POLIKLINIK GUBERNUR

Rosmiani, SE, M.Kes  
Nip: 19670412 198703 2 016

#### Subag Tata Usaha

### UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI

Dra. Hj. Rustia, sy, Apt, M.Kes  
Nip: 19590813 198803 2 001

#### Subag Tata Usaha

Jayasni Salim,S.Si,Apt  
Nip: 197212222003122010

#### Seksi Penyusunan Program, Evaluasi & pelaporan

A. Taswin Akbar, S.Farm  
Nip: 19830622 200604 1

#### Seksi Pelayanan Distribusi & Penyimpanan

Aminuddin, S.Si, Apt  
Nip: 19701119 200312 1 002